

**KEWAJIBAN NAFKAH IDDAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG
TELAH DICERAI (STUDI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KUPANG)**



SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

*Diajukan guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Islam (SHI) pada Program Studi Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

Jumadi Karim

Nim. 10100107021

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari, terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 30 April 2012

Penyusun,

Jumadi Karim

Nim. 10100107021



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulis skripsi saudara **Jumadi Karim**, Nim. **10100107021**, Mahasiswa Program Studi Peradilan Agama pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "*Kewajiban Nafkah Iddah Suami Kepada Isteri Yang Telah Dicerai (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kupang)*", memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk diperoses selanjutnya.

Makassar, 24 Juli 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag, M.Ag.

Nip. 19711020 199703 1 002

Drs. M. Tahir Maloko, M.Hi.

Nip. 19631231 199503 1 006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “*kewajiban Nafkah Iddah Suami Kepada Isteri Yang Telah Dicerai (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kupang)*”, yang disusun oleh saudara **Jumadi Karim**, Nim. **10100107021**, Mahasiswa Program Studi Peradilan Agama pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari, tanggal, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 04 Agustus 2011

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Ali Parman, MA (.....)

Sekretaris : Dra. Sohrah, M.Ag. (.....)

Munaqisy I : Dra. Hj. Rahmatiah, M. Pd. (.....)

Munaqisy II : Dra. Patimah, M.Ag. (.....)

Pembimbing I : Dr. H. Abdul halim Talli, M.Ag. (.....)

Pembimbing II : Drs. M. Thahir Maloko, M.Hi. (.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syari’ah &
Hukum, UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ali Parman, MA

NIP.19570414 198603 1 003

KATA PENGANTAR

ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده.

Puji syuur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas limpahan Rahmat, Taufik, Hidayah serta Inayahnya, sehingga skripsi dengan judul ***“Kewajiban Nafkah Iddah Suami Kepada Istri Yang Telah Dicerai (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kupang)”***, ini dapat terselesaikan walaupun dalam bentuk sangat sederhana.

Salawat, Salam serta Taslim penulis hanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw. beserta para sahabat, dan keluarganya.

Pada penyusunan skripsi ini penulis banyak menemukan banyak hambatan dan kesulitan, namun semua itu dapat terarasi karena Allah senantiasa memberikan jalan keluar yang begitu mudah. Jalan keluar dalam kesulitan yang dihadapi penulis juga melalui orang-orang yang begitu berjasa. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak, antara lain:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta H. Karim Kadjo Ratu N.K dan Ibunda tercinta Hj. Aisyah Musa Watan Songge, yang telah bersusah payah membesarkan, memelihara serta mendidik penulis dengan penuh ketabahan, kesabaran, ketulusan, keikhlasan atas dasar kasih sayangnya.

2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M.S selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, yang selalu memberikan pencerahan dan menjadi contoh pemimpin yang baik.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku mantan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Para Pembantu Dekan yang selalu meluangkan waktunya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama dan Ibu A. Intan Cahyani, S.Ag, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Peradilan Agama serta bapak/ibu dosen dan para karyawan (i) yang penuh keikhlasan memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Dr. H. Abdul Halim Talli, M.Ag, dan Drs. M. Thahir Maloko, M. Hi selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap staf Kantor Pengadilan Agama Kota Kupang atas penerimaan yang begitu baik.
7. Kepada kakanda Maryam Karim, Sumiyati Karim, Nur Aini Karim dan seluruh keluarga penulis yang turut memberikan bantuan, semangat, motivasi serta mendoakan agar penulis mendapatkan hasil yang lebih baik.
8. Kepada teman-teman penulis yang telah ikut berpartisipasi baik dalam dukungan ataupun bantuan-bantuan yang lain yakni: Abdur Rachman Ma'arif. B, Muh. Izzat Abdi, Bahrul Ulum, Muh. Amin, Iin Mutmainnah, Ahmad, Abd

Muhaimin, serta teman-teman seperjuangan di Peradilan Agama yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

9. Sahabat penulis yakni: Raden Muhammad Saleh Til Aqsa, Hasan bin Muhammad Sa'ban, Abu Bakar S. Dasy, serta teman-teman Keluarga Besar HIPPMAL yang banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat membawa manfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan masyarakat, bangsa dan Negara, dan semoga gelar kesarjanaan tidak memisahkan silaturahmi diantara kita semua.

Makassar, 13 Mei 2012

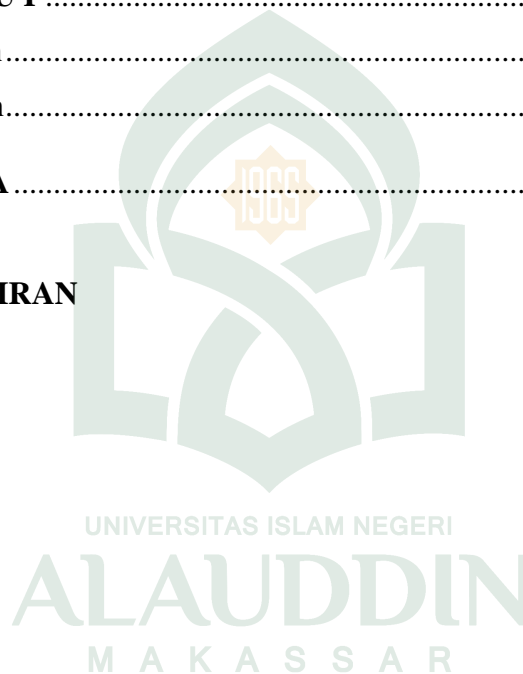
Penyusun



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Oprasional dan Ruang lingkup penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
G. Garis-garis Besar Isi Skripsi.....	12
 BAB II. KEWAJIBAN NAFKAH IDDAH BAGI SUAMI KEPADA ISTERI YANG TELAH DICERAI.....	 14
A. Pengertian Iddah.....	14
B. Dasar Hukum Iddah.....	18
C. Macam-macam Iddah	24
D. Hikmah Disyariatkannya Iddah	30
E. Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Masa Iddah.....	36
 BAB III. WEWENANG PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN KEWAJIBAN NAFKAH IDDAH KEPADA SUAMI ISTRI YANG TELAH DICERAI	 42
A. Kewenangan Pengadilan Agama	42
B. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Iddah	46

BAB IV. PROSES PENYELESAIAN NAFKAH IDDAH SUAMI KEPADA ISTERI YANG TELAH DICERAI	51
A. Preses Penyelesaian dan Sikap Pengadilan Agama Terhadap Bekas Suami yang Tidak Menjalankan Kewajiban.....	51
B. Suami yang Menjalankan Kewajiban dan yang Tidak Menjalankan Kewajiban pada Masa-masa Iddah Isteri yang Telah Dicerai	58
C. Putusan Pengadilan Agama Kupang	60
BAB V. P E N U T U P.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Nama : **Jumadi Karim**
Nim : **10100107021**
Judul : **Kewajiban Nafkah Iddah Suami Kepada Isteri Yang Telah Dicerai (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kupang)**

Skripsi ini berjudul “Kewajiban Nafkah Iddah Suami Kepada Isteri Yang Telah Dicerai (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kupang).” Masalah pokok dalam skripsi ini terfokus pada “Kewajiban Nafkah Iddah Suami kepada Isteri yang Telah Dicerai” yang selanjutnya penulis membaginya dalam 2 sub pokok bahasan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep nafkah iddah menurut hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, cara penyelesaian nafkah iddah dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kupang dalam mengabulkan permohonan nafkah iddah dan untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Kupang tentang nafkah iddah dengan hukum Islam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Syar’i yaitu pendekatan dengan memperhatikan ketentuan syari’at Islam yang bersumber dari Al-quran dan hadits dan pendekatan yuridis yaitu metode pendekatan yang selalu memperhatikan peraturan yang ada dan masih berlaku. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*). selanjutnya data akan diolah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari kebenaran-kebenaran yang sifatnya umum menuju ke arah yang sifatnya khusus. Metode induktif, yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan khusus berupa fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang sifatnya umum. Metode komparatif, yaitu membangun suatu pendapat atau data dengan pendapat atau data yang lain barulah kemudian diambil sebuah kesimpulan.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini bahwa konsep iddah menurut hukum Islam terdapat dalam Al-Qur’an surat At-Thalak ayat 7, konsep nafkah iddah. Menurut Perundang-undangan yakni Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 34. Selanjutnya dalam pengambilan putusan, seorang hakim Pengadilan Agama Kota Kupang dalam menyelesaikan nafkah iddah sudah ada kesesuaian dengan hukum Islam. Akan tetapi ada beberapa kasus yang diputuskan tidak sesuai dengan hukum Islam, hal ini dikarenakan barbagai pertimbangan-pertimbangan sehingga tidak merujuk kembali dengan hukum Islam bahwa nafkah iddah dalam Islam itu wajib dilaksanakan bagi suami yang bercerai dengan isterinya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, oleh karena itu manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Manusia juga mempunyai kebutuhan akan seks, untuk memenuhi kebutuhan ini maka dalam Islam proses tersebut disalurkan melalui akad nikah, sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan suatu ibadah jika diwujudkan sesuai aturan Islam yang telah ditetapkan.

Dalam Islam perkawinan disebut pernikahan, manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Karena Allah tidak mau membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya, atau seperti tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.¹ Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.

¹ Said bin Abdullah bin Thalib bin Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 2.

Setiap pasangan suami isteri mendambakan agar ikatan lahir batin yang didahului dengan akad perkawinan itu kokoh terpatir sepanjang hayat. Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami isteri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.

Perselisihan yang terjadi antara suami isteri wajib diselesaikan berdua secara musyawarah dan mufakat, suami isterilah yang wajib menetralkan dan menormalisir urusan rumah tangganya dan mengobati sendiri luka-lukanya. Apabila krisis rumah tangga yang melanda kehidupan suami istri itu sedemikian memuncak dan tidak mungkin diselesaikan selain harus bercerai, dan memang jalan inilah yang paling menjamin kemaslahatan suami, isteri dan anak-anaknya, maka untuk itu putusnya suatu perkawinan dimungkinkan.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, umumnya pada permasalahan perkawinan. Di Pengadilan Agama (PA) Kupang banyak pengajuan kasus perkawinan khususnya dalam kasus penyelesaian nafkah iddah. Dimana norma-norma dan kaidah-kaidah yang ada dan mengatur masalah ini sudah dikesampingkan dan hukum-hukum yang mengatur masalah ini, sepertinya sudah tidak diindahkan (dipedulikan) lagi.

Pada prinsipnya, perkawinan itu bertujuan untuk selama hidup dan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi suami istri yang bersangkutan. Sehingga Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian antara suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (isteri). Karena semua bentuk perceraian itu akan berdampak buruk bagi masing-masing pihak. Suatu perceraian yang telah terjadi antara suami istri secara yuridis memang mereka itu masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya, terutama si isteri sedang menjalani masa iddah.

Iddah adalah waktu menunggu bagi mantan isteri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena thalak ataupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu tunggu itu mantan isteri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain.²

Pada saat iddah antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perceraian, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya. Bila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai permasalahan, misalnya si anak putus sekolahnya, sehingga anak tersebut menjadi terlantar bahkan menjadi gelandangan. Sedangkan mantan isterinya sendiri tidak menutup kemungkinan akan terjerumus ke lembah hitam.

² Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Cet. VI; Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 125.

Inilah fenomena-fenomena yang sering timbul dari perceraian yang mana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak isteri dan anak pada masa iddah. Setelah terjadi perceraian pada hakikatnya si suami harus memberikan minimal perumahan pada mantan isteri dan anaknya. Berkenaan dengan itu kewajiban suami tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anaknya atau mantan isterinya yang masih dalam masa iddah”.³

Dari bunyi pasal di atas sudah jelas bagi suami yang telah menceraikan isterinya wajib untuk menyediakan tempat tinggal, ataupun membolehkan isterinya untuk tinggal di rumahnya sampai batas masa iddah habis (berakhir). Bila suami melalaikan kewajiban ini, maka isteri dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Gugatan tersebut dapat diajukan bersama-sama sewaktu isteri mengajukan berkas gugatan atau dapat pula gugatan tersebut diajukan di kemudian hari. Akan tetapi ada pula kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada mantan suami, misalnya pada waktu terjadi perceraian tersebut disebabkan isteri murtad atau sebab-sebab lainnya yang menjadi sebab suami tidak wajib manunaikan hak isteri dan bila telah ada kemufakatan bersama atas putusan Pengadilan Agama tentang nafkah anak tersebut, maka dapat pula nafkah si anak ditanggung bersama antara keduanya (suami-isteri).

³ Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Yogyakarta Pres, 1993), h. 199.

Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa nafkah iddah. Namun untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas, para pencari keadilanlah yang selalu agresif mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama. Bila tidak mendapat kejelasan dan kepastian hukum sudah barang tentu pengajuan perkara haruslah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Bertitik tolak dari realitas yang ada ini, penyusun merasa terpanggil untuk membahas lebih mendalam tentang penyelesaian nafkah iddah. Dengan pembahasan tersebut diharapkan akan mendapat suatu gambaran, dan jawaban yang konkrit dalam implikasi Pengadilan Agama dan Undang-undang kehidupan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan mempertegas hal tersebut dengan memformulasikan dalam suatu permasalahan utama, yaitu; “Bagaimana Kewajiban Nafkah Iddah Suami kepada Isteri yang Telah Dicerai?”. Yang kemudian dibagi dalam beberapa sub masalah, yaitu :

1. Bagaimana konsep nafkah iddah menurut Hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana cara penyelesaian nafkah iddah dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kupang dalam mengabulkan permohonan nafkah iddah?
3. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Kupang tentang nafkah iddah?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dan kesulitan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan dan dikemukakan beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan apa yang akan disampaikan, yaitu :

- a. Yang dimaksud “kewenangan Pengadilan Agama” ialah suatu proses hukum dimana Pengadilan Agama atau majlis hakim berhak untuk memeriksa, menyelesaikan, menetapkan, dan memutuskan perkara atau permasalahan yang diajukan oleh pihak-pihak untuk mendapatkan kepastian hukum, selama masalah tersebut dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama.⁴
- b. Yang dimaksud “masa iddah” ialah masa tunggu bagi si isteri yang telah diceraikan oleh suaminya dimana isteri belum boleh kawin lagi dengan laki-laki lain (bukan suami) sebelum masa iddah itu habis dan masa iddah ini juga merupakan masa berfikir bagi suami apakah ia untuk meneruskan perceraian tersebut atau kembali kepada bekas isterinya.
- c. Yang dimaksud dengan “nafkah iddah akibat perceraian” ialah suatu pemberian yang berupa nafkah yang diberikan pada seorang isteri.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui sejauhmana masalah tersebut yang telah dibahas, maka penulis mengemukakan bahwa judul yang penulis kaji ini, belum ada yang membahasnya. Sehingga dengan demikian penulis berani mengangkat judul ini.

⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: IKAHI, 2008), h. 37.

Setelah menelusuri beberapa referensi yang berkaitan dengan pembahasan ini, penulis menemukan beberapa buku, yaitu:

H. M. Djamil Latief, dalam bukunya *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas seorang isteri yang terputus ikatan perkawinannya dengan suaminya baik ditinggalkan mati atau perceraian, karena itu ada iddah mati dan ada iddah cerai (waktu hidup).⁵

H. Abd. Rahman Ghazaly, dalam karyanya *Fiqh Munakahat*, yang dimaksud dengan iddah yaitu masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.⁶

Anshori Umar, dalam bukunya *Fiqih Wanita*, menjelaskan Allah SWT. telah mensyari'atkan iddah, karena dalam iddah itu terkandung beberapa hikmat yang tak ternilai harganya dan merupakan salah satu sumber keteraturan hidup, yang antara lain adalah apakah dalam rahim wanita itu telah terkandung benih janin atau tidak, sehingga nasabnya nanti tidak kacau. Begitu pula memberi kesempatan barangkali suami mau rujuk kembali kepada isterinya dan sadar dari keterlanjutannya yang membabi-butakan setelah difikirannya dan dipertimbangkan dalam-dalam. Juga, dengan iddah itu akan semakin nampak betapa belas-kasih Tuhan kepada umat manusia, karena dalam menunggu (iddah) orang akan tahu betapa indahnya atau nikmatnya bersuami atau beristeri dan betapa malangnya perceraian sehingga dibenci oleh

⁵ H. M. Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: 1982), h. 79.

⁶ H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 302.

Tuhan. Hikmat yang lain ialah, bila iddah itu untuk istri yang ditinggal mati suaminya, maka di waktu itu ia lebih nampak berkabung, sehingga semakin terasa penghormatannya terhadap suami.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat (1) yang berbunyi : “Bagi isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla dukhul* dan perkawinan putus bukan karena kematian suami.⁸Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa setiap isteri yang diceraikan suaminya diharuskan untuk menjalani masa iddah, yang lama waktunya ditetapkan menurut keadaan isteri yang diceraikan atau suami yang menceraikannya, yakni apakah perceraian itu terjadi karena cerai proses pengadilan atau cerai karena kematian. Setelah terjadinya perceraian berdasarkan hukum perdata maupun syara’ si suami dibebankan untuk memberikan perumahan kepada pihak mantan isteri. Dan apabila si suami tidak memberikannya, baik itu perumahan ataupun nafkah kehidupan (uang belanja) maka si isteri dapat mengajukan masalah tersebut kepada Pengadilan Agama mengajukan tuntutan perumahan ataupun biaya nafkah dapat diajukan befrsamasama dengan permohonan cerai dan dapat pula diajukan kemudian.

H. Sastroadmojo, dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia*, yang menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap isteri tersebut diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 (c), yang berbunyi : “Pengadilan Agama dapat

⁷ Anshori Umar, *Fiqih Wanita* (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1986), h. 434-435.

⁸ *Ibid.*, h. 210.

mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami”.⁹

Menurut Azhar Basyir, dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia*, yang menjelaskan tentang suatu perceraian yang terjadi karena kematian suaminya baik itu perceraian yang terjadi, kemudian si suami meninggal dunia maka bekas isterinya tidaklah dapat menuntut hak kepada orang yang telah meninggal dunia. Tetapi nafkah dapat diambil dengan menyisihkan sebagian harta peninggalan si suami yang meninggal tersebut.¹⁰

M. Tholib, dalam bukunya *Liku-liku Perkawinan*, menjelaskan dalam masalah hak isteri pada masa iddah itu menjelaskan bahwa perempuan beriddah mendapatkan hak kediaman (perumahan), dan ia haruslah tetap tinggal di rumah suaminya habis masa iddahanya. Dan suami tidak berhak menyuruh isterinya keluar dari rumah tersebut, sekalipun telah jatuh talak atau perpisahan ketika tidak di rumah suami, maka isteri tetaplah wajib untuk pulang ke rumah suaminya itu begitu ia mengetahui bahwa telah jatuh talak tersebut.¹¹

E. Metodologi Penelitian

Ada beberapa metode penelitian yang dipergunakan dalam pembahasan ini antara lain:

⁹ H. Sastroadmojo, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 59.

¹⁰ Azhari Basyir, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: 1997), h. 77.

¹¹ M. Thalib, *Liku-liku Perkawinan* (Cet. I; Yogyakarta: P.D. Hidayat, 1986), h. 168

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan, sebagai berikut:

- a. Pendekatan Syar'i yaitu pendekatan dengan memperhatikan ketentuan syari'at Islam yang bersumber dari Alquran dan hadits.
- b. Pendekatan Yuridis yaitu metode pendekatan yang selalu memperhatikan peraturan yang ada dan masih berlaku.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh sebagai bahan penelitian ini menggunakan data yang dapat dipercaya kebenarannya, pengumpulan data ini dilakukan melalui:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam studi kepustakaan ini penulis mengumpulkan data-data dengan cara membaca, mencatat, mempelajari dan menganalisa isi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam studi lapangan ini penulis mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kupang. Penelitian didasari pada tugas hakim dalam menyelesaikan masalah kewajiban nafkah iddah suami kepada istri yang telah diceraikan dengan mengadakan wawancara dan pengambilan data.

3. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penulis menggunakan metode kuantitatif dengan melihat aspek-aspek penelitian. Untuk analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari kebenaran-kebenaran yang sifatnya umum menuju ke arah yang sifatnya khusus.
- b. Metode induktif, yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan khusus berupa fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang sifatnya umum.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui konsep nafkah iddah menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui cara penyelesaian nafkah iddah dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kupang dalam mengabulkan permohonan nafkah iddah.
- c. Untuk mengetahui kesesuaian putusan Pengadilan Agama Kupang tentang nafkah iddah dengan hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan dan kontribusi kepada peneliti khususnya dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan nafkah iddah.
- b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S-1) dalam bidang hukum Islam (syari'ah).
- c. Sebagai wacana bagi para pembaca.

G. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis yaitu sebagai berikut:

Pada Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pengertian judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta garis-garis besar isi skripsi.

Pada Bab II tujuan umum tentang kewajiban nafkah iddah suami kepada isteri yang telah diceraikan yang terdiri dari pengertian iddah, dasar hukum iddah, macam-macam iddah, hikmah disyariatkannya iddah, serta hak dan kewajiban suami isteri pada masa iddah.

Pada Bab III wewenang Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kewajiban nafkah iddah kepada suami isteri yang telah diceraikan yang meliputi kewenangan Pengadilan Agama dan kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan iddah.

Pada Bab IV proses penyelesaian nafkah iddah suami kepada isteri yang telah dicerai yang meliputi proses penyelesaian dan sikap Pengadilan Agama terhadap bekas suami yang tidak menjalankan kewajiban, suami yang menjalankan kewajiban dan tidak menjalankan kewajiban pada masa-masa iddah isteri yang telah dicerai, serta putusan Pengadilan Agama Kupang.

Pada Bab V adalah penutup dan akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran dari isi skripsi yang diambil dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya.



BAB II

KEWAJIBAN NAFKAH IDDAH BAGI SUAMI KEPADA ISTERI YANG TELAH DICERAI

A. *Pengertian Iddah*

Bagi isteri yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik karena ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan yaitu masalah iddah. Keharusan beriddah merupakan perintah Allah yang dibebankan kepada bekas isteri yang telah diceraikan baik dia (isteri) orang yang merdeka maupun hamba sahaya untuk melaksanakannya sebagai manifestasi ketaatan kepadanya.

Untuk memudahkan pembahasan mengenai pengertian iddah ini, maka penulis mengungkapkan dan menyajikan dari dua segi yaitu dari segi bahasa dan segi istilah.

1. **Dari segi bahasa**

Sebelum mengkaji lebih lanjut tentang nafkah iddah terlebih dahulu penulis kemukakan arti iddah. Kata iddah ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata *al-'adad*, sedangkan kata *al'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja '*adda-ya'uddu* yang berarti menghitung. Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang

dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama' dari kata *al-'adad* adalah *al-a'dad* begitu pula bentuk jama' dari kata *'iddah* adalah *al-'idad*.¹

Iddah berasal dari kata *al-'adad*, yang berarti bilangan dan menghitung. Yaitu hari yang dihitung dan dipergunakan bagi seorang perempuan selama ia suci dari haid. Bilangan iddah itu dimulai sejak adanya penyebab iddah, yakni talak atau meninggalnya suaminya.²

Dalam kitab fiqh ditemukan definisi iddah itu yang pendek dan sederhana diantaranya adalah *مدة تتربص فيها المرأة* atau masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Karena sederhananya definisi ini ia masih memerlukan penjelasan terutama mengenai apa yang ditunggunya, kenapa dia menunggu, dan untuk apa dia menunggu.³

Pada hakekatnya iddah sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, kemudian setelah Islam datang iddah ini dilanjutkan karena bermanfaat.⁴ Ulama bersepakat bahwa iddah itu wajib, berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) : 228;

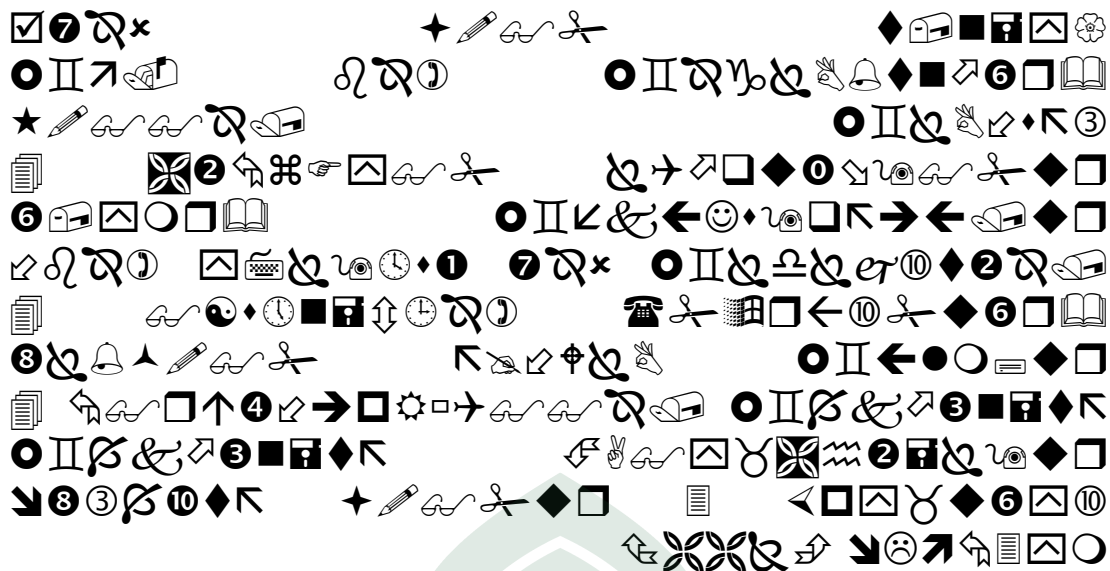


¹ <http://satriabajahikam.blogspot.com/2012/04/pengertian-dan-dasar-hukum-iddah.html> (29 April 2012).

² Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan DEPAG, *Ilmu Fiqih*, vol. II (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 299.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Jakarta Kencana, 2007), h. 303.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8, terj. Muh. Tholib (Cet II; Bandung: Al-Ma'arif, 1983), h. 139-140.



Terjemahnya:

“Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi maha Bijaksana”.⁵

Dengan demikian jika ditinjau dari segi bahasa, maka kata iddah dipakai untuk menunjukan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita.⁶

2. Dari segi istilah

Menurut istilah iddah adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara’ bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2002), h. 45.

⁶ Chuzaimah T. Yanggo, *et al.*, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 149.

suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu.⁷

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, akan diambil pengertian yang sifatnya sudah cukup tegas. Hal ini disebabkan karena definisi waktu tunggu iddah itu sendiri sudah diulas secara konkrit dan jelas. Menurut H. Sastroadmojo dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* dijelaskan bahwa iddah adalah tenggang waktu dimana janda bersangkutan tidak boleh kawin bahkan dilarang pula menerima pinangan atau lamaran dengan tujuan untuk menentukan nasab dari kandungan janda itu apabila ia hamil, dan juga sebagai masa berkabung bila suami yang meninggal dunia dan untuk menentukan masa rujuk bagi suami bila talak itu berupa talak raj'i.⁸

Pemahaman ini diinspirasi secara implisif oleh pasal-pasal yang berhubungan dengan masalah iddah itu sendiri yaitu pasal 11 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan demikian pengertian iddah adalah masa tenggang waktu atau tunggu sesudah jatuhnya talak. Di dalam waktu iddah itu bekas suami diperbolehkan untuk merujuk kepada bekas istrinya. Atas dasar inilah si istri tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.⁹

⁷ *Ibid.*, h. 61.

⁸ H. Sastroadmojo, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 70.

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 120.

B. Dasar Hukum Iddah

Setelah membahas masalah iddah dari segi pengertian, maka di bawah ini penyusun akan membahas tentang dasar-dasar hukum iddah yang mengacu pada hukum guna memperjelas tentang iddah itu sendiri.

Adapun dasar hukum mengenai iddah antara lain:

1. Dasar dari Al-Qur'an

Dalam surat Al-Baqarah (2) : 228;

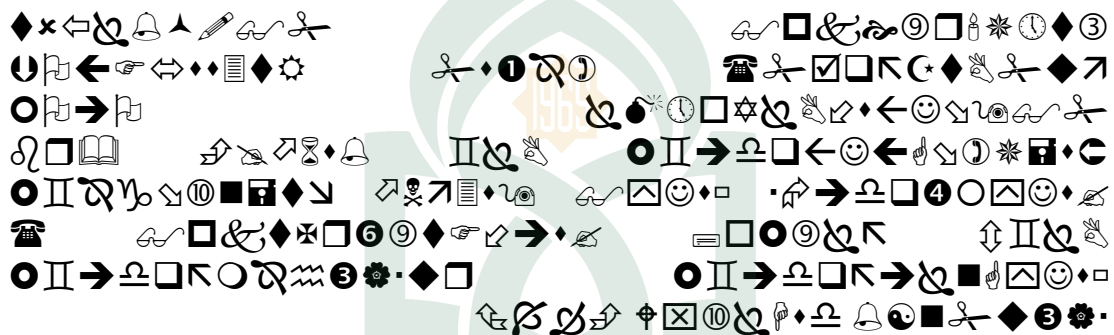


Terjemahnya:

“Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹⁰

¹⁰ Departemen Agama RI, *loc. cit.*

Yang menjalani iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai dengan suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati sedangkan dalam keadaan hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak wajib menjalani masa iddah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzab (33) : 49;



Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, dan kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.¹¹

Ayat di atas walaupun sebenarnya telah dinasakh oleh ayat yang kemudian, akan tetapi kandungan dari hukum ayat tersebut tetaplah dipakai dan dipergunakan sebagai dalil hukum dalam penetapan hukum Islam yang berkenaan dengan masalah iddah isteri.

2. Dasar dari Hadits

¹¹ *Ibid.*, h. 600.

Dalam sunnah Nabi yang dijadikan sebagai dasar hukum tentang iddah yakni:

وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر
(خرجه مالك و الشافعي)

Artinya:

“Dari Umar ra berkata : bagi perempuan yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui di mana suaminya berada, sesungguhnya perempuan itu wajib menunggu empat tahun, kemudian hendaklah ia beriddah empat bulan sepuluh hari, barulah ia boleh menikah.” (hadist riwayat Malik).¹²

Hadist diatas mengisahkan seorang istri yang kehilangan suami. Dalam kisah tersebut dinyatakan bahwa suaminya hilang disembunyikan jin selama empat tahun. Setelah si isteri mengetahui suaminya hilang, dia pergi menghadap Umar bin Khattab dan Umar menyuruh perempuan itu menunggu selama empat tahun, sesudah berlalu empat tahun, Umar memanggil wali si suami dan memerintahkannya untuk menceraikan perempuan itu sebagai wali dari suaminya. Kepada perempuan itu Umar memerintahkan agar beriddah empat bulan sepuluh hari.

عجزة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن القرية بنت مالك
سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله
أن ترجع إلي أهلها في بني خدره فإن زوجها خرجا في طلب أعبد له أبقوا حتي إذا كانوا بطرف
وم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلي أهلي فأني لم يتركني في
مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم). قالت فخرجت حتي إذا
كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال (كيف قلت) فرددت عليه القصة
شأن زوجي قالت فقال (امكتي في بيتك حتي يبلغ الكتاب أجله) قالت فاعتددت
فيه أربعة أشهر و عشرا قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته
فأثبته وقضيه ()

¹² Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunnah ibn Majjah*, juz I (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), h. 650.

Artinya:

“Dari Sa’d bin Ishaq bin Ka’bin bin ‘Ajjah dari bibinya yaitu Zainab binti Ka’bin bin ‘Ajjah bahwa Al Furai’ah binti Malik bin Sinan yang merupakan saudari Abu Sa’id Al Kudri telah mengabarkan kepadanya bahwa ia datang kepada Rasulullah saw. meminta izin kepada beliau untuk kembali kepada keluarganya di antara Bani Khudrah, karena suaminya keluar mencari beberapa budaknya yang melarikan diri hingga setelah mereka berada di Tharaf Al Qadum ia bertemu dengan mereka lalu mereka membunuhnya. Aku meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk kembali kepada keluargaku, karena suamiku tidak meninggalkanku tinggal di tempat tinggal yang ia miliki dan tidak memberikan nafkah. Ia berkata; kemudian aku keluar hingga setelah sampai di sebuah ruangan atau di masjid, beliau memanggilku dan memerintahkan agar aku datang. Kemudian beliau berkata: “Apa yang engkau katakan?” kemudian aku kembali menyebutkan kisah yang telah saya sebutkan, mengenai keadaan suamiku. Lalu beliau berkata: “Tinggallah di rumahmu hingga selesai masa iddahmu.” Ia berkata; kemudian aku ber’iddah di tempat tersebut selama empat puluh bulan sepuluh hari. Ia berkata; kemudian tatkala Utsman mengirimkan surat kepadaku, ia bertanya mengenai hal tersebut, lalu aku khabarkan kepadanya, lalu ia mengikutinya dan memberikan keputusan dengannya.”(H.R. Abu Dawud).¹³

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib melakukan tiga hal yaitu menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari terhitung dari wafatnya suami, menjalani iddah yaitu tidak berhias selama masa iddah, dan tinggal di rumah suami selama masa iddah. Di masa iddah tersebut, wanita tidak boleh dilamar atau dipinang secara terang-terangan, diberi janji untuk dinikahi, apalagi melakukan akad nikah.

3. Dasar dari Perundang-undangan

¹³ Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 1992), h. 308.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang telah putus perkawinannya.¹⁴

Selanjutnya atas dasar pasal 11 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut:

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.¹⁵

Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada bab VII pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih bertadang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari.

¹⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h. 20.

¹⁵ Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan* (Cet. I; Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 4.

- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tentang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.¹⁶

Pada Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan dalam menentukan waktu tunggu sebagai berikut:

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.

¹⁶ *Ibid.*, h. 39.

- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al-dukhul.
 4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
 5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
 6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama 1 (satu) tahun, akan tetapi bila dalam waktu 1 (satu) tahun tersebut haid kembali, maka iddahnya menjadi 3 (tiga) kali waktu suci.¹⁷

Demikian pula dalam Pasal 154 dan 155 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, mengatur waktu iddah.¹⁸

C. Macan-macan Iddah

¹⁷ Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I.(Jakarta: 1991), h. 70-71.

¹⁸ *Ibid.*, h. 71-72.

Mengenai macam-macam iddah atau waktu tunggu menurut Perundang-undangan hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, telah memberikan klasifikasi dengan tidak menyebut suatu istilah tertentu yang dipergunakan. Akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa materi dari Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya merupakan cuplikan yang diambil dari norma masing-masing agama di Indonesia yang didominasi oleh aturan-aturan yang digariskan dalam syari'at Islam.

Sedangkan secara spesifikasi maka macam-macam iddah itu antara lain ialah:

1. Iddah bagi isteri yang haid

Jika perempuannya biasa haid maka iddahnya tiga kali quru'. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 228;

.....

Terjemahnya:

“Dan perempuan-perempuan yang bertalak, hendaklah mereka menahan diri mereka tiga kali quru'....”.¹⁹

Dengan ayat tersebut di atas jelaslah bahwa isteri yang diceraikan suaminya, sedangkan isteri tersebut belum pernah disetubuhi oleh suami yang mentalaknya, maka bagi si isteri tersebut tidak mempunyai masa iddah.

¹⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 45.

“Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari.²⁰

adalah dalam QS. At-Talaq (65) : 4;

[illegible]

²⁰ H. Sastroadmojo, *op. cit.*, h. 129.

Terjemahnya:

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara isteri-isterimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”.²¹

Sedangkan berdasarkan hukum perdata Indonesia maka isteri tersebut harus menjalani masa tunggu selama Sembilan puluh hari. Ini sejalan dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ayat (1) sub (b) yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari”.²²

3. Iddah bagi Isteri Yang Belum Disetubuhi

Isteri yang ditalak akan tetapi belum pernah disetubuhi adalah tidak wajib beriddah, atau dengan kata lain tidak ada iddahnya.²³ Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab (33) : 49;



²¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 817.

²² Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Yogyakarta Pres, 1993), h. 210.

²³ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 141.

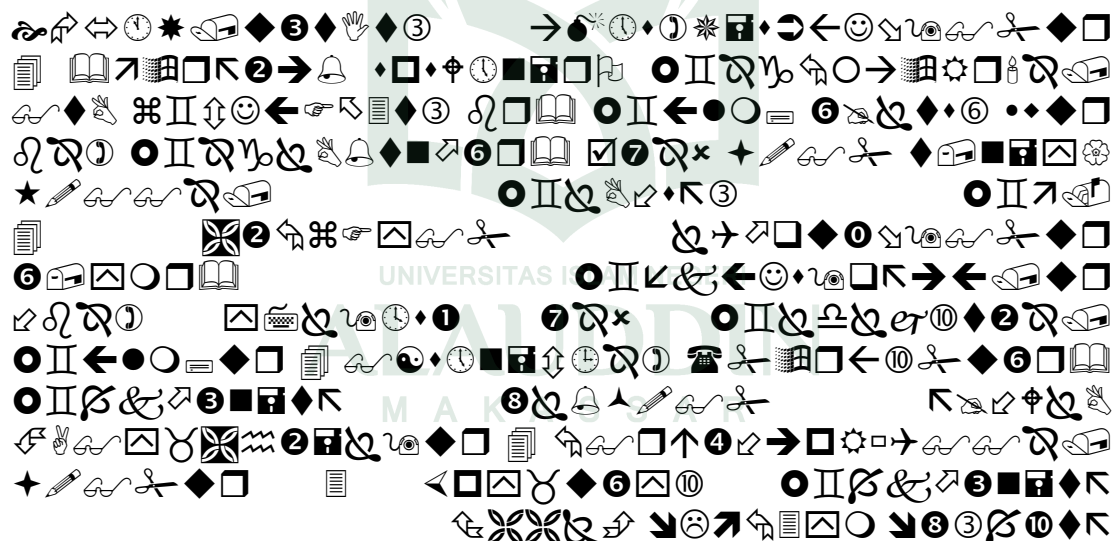
Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, dan kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mutah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.²⁴

Para ulama’ mahzab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai iddah.²⁵

4. Iddah bagi Isteri Yang Telah Disetubuhi

Iddah istri yang telah disetubuhi masih haid dan adakalanya tidak berhaid lagi, masa iddahnya tiga kali quru’, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 228;



Terjemahnya:

“Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Muhammad Mughriyah Jawad, *Al-fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 464.

Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi maha Bijaksana”.²⁶

Arti quru’ () dalam ayat di atas adalah () jamak dari kata () yang berarti haid, hal ini dikuatkan oleh Ibnul Qoyyim yang diterangkan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* bahwa kata quru’ hanya digunakan oleh agama yang berarti haid. Sedangkan masa iddah untuk istri yang telah disetubuhi tetapi tidak mengalami haid maka lama iddahnya adalah tiga bulan sembilan puluh hari.²⁷

5. Iddah bagi Istri Yang Sedang Hamil

Istri yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya dan sedang hamil, maka iddahnya sampai ia melahirkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. At-Talaq (65) : 4;



Terjemahnya:

“Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya....”.²⁸

Istri tersebut harus menjalani masa tunggu yakni sampai ia melahirkan bayinya. Ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 153 ayat (2) sub (c), yang berbunyi sebagai berikut:

²⁶ Departemen Agama RI, *loc. cit.*

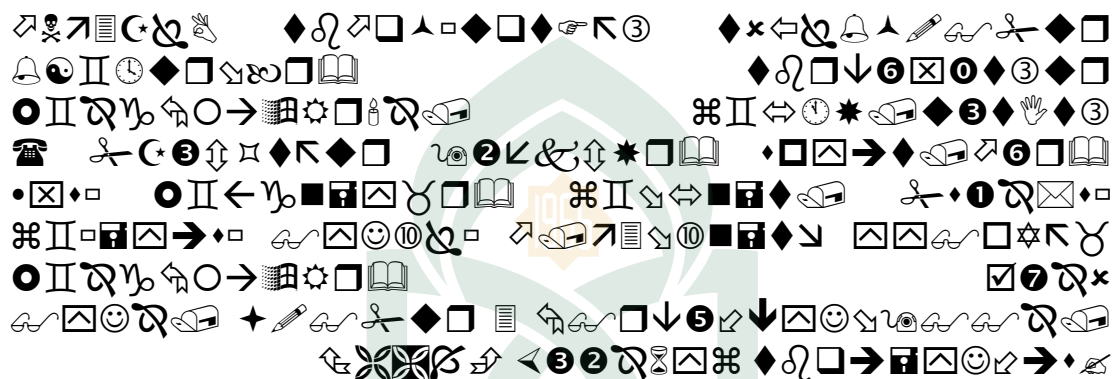
²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Ibnul Qoyyim (Bandung: Al-Ma’arif, 1980), h. 120.

²⁸ Departemen Agama RI, *loc. cit.*

“Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang antar janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.²⁹

6. Iddah bagi isteri yang suaminya meninggal dunia

Iddah isteri yang ditinggal mati suaminya dan si isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka lama iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 234;



Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka (isteri-isteri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁰

Para ulama madzhab sepakat bahwa iddah isteri yang ditinggal mati suaminya sedangkan ia tidak hamil maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, baik isteri tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia menopause atau tidak.

²⁹ Republik Indonesia, *loc. cit.*

³⁰ *Ibid.*, h. 47.

Akan tetapi apabila dia diduga hamil atau kemungkinan sedang hamil maka ia harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya.³¹

Menurut Imam Malik, iddah seorang isteri yang ditinggal mati suaminya sedang ia dalam keadaan mengandung maka iddahnya diambil waktu yang lebih lama, bisa empat bulan sepuluh hari dan bisa juga setelah melahirkan.³²

D. Hikmah Disyariatkannya Iddah

Suatu keyakinan yang mesti menjadi pengamat umat Islam ialah ajaran Islam yang termuat di Al-Qur'an dan as Sunnah merupakan petunjuk Allah dan Rasulullah saw. yang harus menjadi pedoman bagi manusia khususnya kaum muslimin dan muslimat demi kemaslahatan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Berbeda dengan hal ajaran-ajaran yang pernah diturunkan Allah sebelumnya dimana ajaran tersebut hanya diperuntukan untuk kaum tertentu.

Ajaran Islam tidak hanya berlaku untuk kelompok atau kaum di dalam masyarakat tertentu serta tidak pula terbatas pada masa tertentu pula, akan tetapi ajaran Islam sejak diturunkan telah ditetapkan sebagai pegangan dari semua kelompok dan kaum manusia pada berbagai tempat dan waktu sampai akhir masa (zaman).³³

³¹ Muhammad Mughriyah Jawad, *op. cit.*, h. 196.

³² Ibnu Rusd dan Imam Ghozali Said, *Bidayatul Mujtahid*, vol. III (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 210.

³³ Chuzaimah T. Yanggo, *et al.*, *op. cit.*, h. 148.

Demikian pula halnya dengan masalah iddah yang merupakan suatu syari'at yang telah ada sejak zaman dahulu yang mana mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini dan tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena banyak terdapat kebaikan dan faedah di dalamnya.³⁴ Perempuan yang ditalak raj'i mengandung suatu hikmah yang tertuju pada tiga hak yakni hak suami yang mentalak, hak anak, dan hak isteri itu sendiri.

Hak suami yang mentalak adalah menjaga hak rujuk kapan dia suka untuk rujuk kepada mantan isterinya. Allah meluaskan masa iddah tersebut hingga tiga kali suci, barangkali dalam masa iddah yang sekian panjangnya itu hati suami menjadi jernih dan ada kecocokan untuk kembali mendampingi isteri dan ia memilih untuk rujuk.

Hak anak adalah diperuntukkannya dengan ayah dan nasabnya tidak kabur hingga menghilangkan hak warisan. Sedangkan hak isteri itu sendiri adalah agar dia mengerti apakah dia hamil atau tidak.

Suami yang mentalak mempunyai hak rujuk (kembali) kepada isteri yang ditalak apabila disuka selama dalam masa iddah. Hak ini adalah salah satu hikmah tersebut.³⁵

Selain itu hikmah dari pemberian nafkah perempuan yang sudah ditalak dalam buku terjemah Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu menyatakan ketika Allah

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Syekh Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmatuh al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, terj. Hadi Mulyo, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: Adhi Grafika, 1992), h. 326.

mewajibkan adanya masa iddah bagi wanita yang ditalak, maka Dia juga mewajibkan suami yang mentalak untuk memberikan nafkah pada isterinya. Hal ini karena suami penyebab terjadinya talak dan masih terikat tali perkawinan hingga habis masa iddah, terkadang seorang isteri yang ditalak itu fakir dan tidak ada seorangpun yang menanggungnya. Maka dari itu suami yang mentalak itu wajib memberikan nafkah selama masa iddah serta persiapannya untuk kawin dengan laki-laki lain, itu merupakan salah satu perhatian Allah terhadap masalah nafkah ini sehingga seorang isteri ini diperbolehkan berhutang kalau suaminya itu fakir atau meralat.³⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga sudah diatur pada Pasal 149 poin (b) bahwasannya apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.³⁷

Para ulama' telah mencoba menganalisa hikmah disyariatkannya iddah secara global dan dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain, atau agar tidak ada percampuran dan kekacauan nasab.

³⁶ *Ibid.*, h. 335.

³⁷ *Ibid.*, h. 69.

2. Memberikan kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk berfikir kembali, apakah untuk rujuk kembali kepada isterinya ataukah akan meneruskan cerai tersebut jika hal tersebut dianggap lebih baik.
3. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan aqadnya.³⁸

Untuk lebih jelas dan lebih mendetailnya hikmah disyariatkannya iddah tersebut maka dapat dikemukakan seperti di bawah ini.

1. *Sebagai pembersih rahim*

Ketegasan keturunan dalam Islam merupakan hal yang amat penting, oleh karena itu segala ketentuan untuk menghindari terjadinya kekacauan nasab keturunan manusia ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan As Sunnah dengan tegas. Diantara ketentuan tersebut adalah larangan bagi wanita untuk menikah dengan beberapa orang pria dalam waktu yang bersamaan,³⁹ dan disamping itu untuk menghilangkan keragu-raguan tentang kesucian rahim perempuan tersebut, sehingga pada nantinya tidak ada lagi keragu-raguan tentang anak yang dikandung oleh perempuan itu apabila ia telah kawin dengan laki-laki yang lain.⁴⁰

2. *Kesempatan untuk berfikir*

Iddah khususnya dalam talak raj'i merupakan suatu tenggang waktu yang memungkinkan tentang hubungan mereka, dalam masa ini kedua belah pihak dapat

³⁸ *Ibid.*, h. 140.

³⁹ Chuzaimah T. Yanggo, *et al.*, *op. cit.*, h. 166.

⁴⁰ Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 230.

mengintropeksi diri masing-masing guna mengambil langkah-langkah yang lebih baik, terutama bila mereka telah mempunyai putra-putri yang membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang tuanya.⁴¹ Disamping itu untuk memberikan kesempatan berfikir kembali dengan pikiran yang jernih setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruh sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Kalau pikiran mereka telah jernih dan dingin diharapkan pada nantinya suami akan merujuk isteri kembali dan begitu pula si isteri tidak menolak untuk rujuk dengan suaminya kembali, sehingga perkawinan mereka dapat diteruskan kembali.⁴²

3. *Kesempatan untuk berduka cita*

Iddah khususnya dalam kasus cerai mati adalah masa duka atau bela sungkawa atas kematian suaminya. Cerai karena mati ini merupakan musibah yang berada di luar kekuasaan manusia untuk membendungnya, justru itu mereka telah berpisah secara lahiriyah akan tetapi dalam hubungan batiniyah mereka begitu akrab.⁴³ Jadi apabila perceraian tersebut karena salah seorang suami isteri meninggal dunia, maka masa iddah itu adalah untuk menjaga agar nantinya jangan timbul rasa tidak senang dari pihak keluarga suami yang meninggal, bila pada waktu ini si isteri

⁴¹ Chuzaimah T. Yanggo, *et al.*, *op. cit.*, h. 167.

⁴² Soemiyati, *op. cit.*, h. 120.

⁴³ Chuzaimah T. Yanggo, *et al.*, *op. cit.*, h. 168.

menerima lamaran ataupun ia melangsungkan perkawinan baru dengan dengan laki-laki lain.⁴⁴

4. *Kesempatan untuk rujuk*

Apabila seorang isteri dicerai karena talak yang mana bekas suami tersebut masih berhak untuk rujuk kepada bekas isterinya, maka masa iddah itu adalah untuk berfikir kembali bagi suami untuk apakah ia akan kembali sebagai suami isteri. Apabila bekas suami berpendapat bahwa ia sanggup mendanai kehidupan rumah tangganya kembali, maka ia boleh untuk merujuk kembali isterinya dalam masa iddah. Sebaliknya apabila suami berpendapat bahwa tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga kembali, maka ia melepas bekas isterinya secara baik-baik dan jangan menghalang-halangi bekas isterinya itu untuk kawin dengan laki-laki lain.⁴⁵

Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa iddah itu memiliki berbagai keutamaan diberbagai aspek, yang mana masing-masing mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan.

Sehubungan dengan itu maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa:

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidaklah dapat mengubah ketentuan dalam kasus-kasus yang sudah jelas dikemukakan dan ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As Sunnah, namun hanya dalam kasus wathsyubhat dan zina.

⁴⁴ Kamal Muktar, *op. cit.*, h. 231.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 230.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan, sebab hukum antara pria dan wanita dalam kasus ini hanya terkait pada masalah dukhul yang menggunakan kesucian rahim.

- b. Meskipun terdapat keyakinan bahwa rahim perempuan (isteri) bersih dan diantara mereka (suami isteri) tidak mungkin rujuk kembali, namun tidaklah dapat dibenarkan bagi perempuan tersebut (bekas isteri) melanggar ketentuan iddah yang sudah dibentuk.
- c. Begitu pula sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan untuk memperpanjang iddah bagi isteri yang dapat mengakibatkan penganiayaan maupun yang mendatangkan keuntungan baik bagi bekas suami ataupun bagi bekas isteri.⁴⁶

E. Hak dan Kewajiban Suami Isteri pada Masa Iddah

Hak isteri merupakan kewajiban suami untuk melaksanakan atau memenuhi hak-hak isteri, sedangkan kewajiban isteri merupakan hak suami yang harus dijalankan oleh isteri pada masa iddah.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 yang berbunyi:

“Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”.⁴⁷

⁴⁶ Chuzaimah T. Yanggo, *et al.*, *op. cit.*, h. 169.

⁴⁷ Djaja S. Meliala, *op. cit.*, h. 11.

Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 yang berbunyi:

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang hidup lainnya.⁴⁸

Berdasarkan pada pasal di atas dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa perumahan masuk ke dalam kategori dari bunyi pasal dan hukum di atas untuk mewajibkan suami menyediakan tempat kediaman bagi isteri selama masa iddah ataupun setelahnya. Akan tetapi bila isteri itu sendiri yang meninggalkan rumah yang telah ditetapkan tanpa alasan yang dipertanggung jawabkan, maka isteri tersebut telah dianggap *nusyuz*.

⁴⁸ Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 45.

Adapun kewajiban lainnya bagi suami adalah memberikan biaya nafkah selama masa iddah, sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul.
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al-dukhul.
- d. Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Drs. H. Saiful Heja, M.H. nafkah iddah itu tergantung pada pihak isteri itu sendiri. Adapun suami sendiri yang dengan suka rela tanpa dituntut oleh isteri di Pengadilan Agama untuk memenuhi kewajiban isteri yang pada masa iddah.⁵⁰

Apabila isteri berkeinginan menuntut nafkah iddah, maka dapat dilaksanakan berdasarkan pada Pasal 86 ayat Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

⁴⁹ *Ibid.*, h. 69.

⁵⁰ Drs. H. Saiful Heja, Ketua Pengadilan Agama Klas I B Kupang, Kota Kupang, NTT, wawancara oleh penulis di Kota Kupang, (17-30 April 2012).

1. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Jika ada tuntutan dari pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.⁵¹

Nafkah iddah ini merupakan hak isteri pada masa iddah dan kewajiban suami pula untuk melaksanakannya, akan tetapi dari tahun 2010 sampai 2011 masih relatif kecil yang melaksanakannya. Hal ini dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah pendidikan.⁵² Mengenai jumlah nafkah iddah isteri tersebut sangat relatif, bila terjadi perselisihan mengenai jumlah dapat diajukan dan diberikan pengarahannya oleh Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka Pengadilan Agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada saat setelah pembacaan sighot talak di muka majelis hakim Pengadilan Agama.

⁵¹ Republik Indonesia, "Undang-undang R.I Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama" (Jakarta: Dharma Bakti, 1989), h. 22.

⁵² *Ibid.*,

Suami dapat untuk tidak melaksanakannya disebabkan si isteri melalaikan kewajibannya atau sebab yang lainnya yaitu si isteri mengikhlaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya.⁵³

Ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 yang berbunyi antara lain:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal rumah tangganya yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a dan b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

⁵³ *Ibid.*,

6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a dan b).
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.⁵⁴

Dari bunyi Pasal tersebut di atas tampak jelas suami dapat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu:

1. Apabila si isteri benar-benar telah mengikhloffkannya.
2. Apabila si isteri dalam keadaan *nusyuz*, maka akibat hukumnya isteri pada masa iddah gugur dengan sendirinya baik perkara tersebut dalam proses Pengadilan ataupun tidak.



⁵⁴ *Ibid.*, h. 44.

BAB III

**WEWENANG PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN
KEWAJIBAN NAFKAH IDDAH KEPADA SUAMI ISTRI
YANG TELAH DICERAI**

A. *Kewenangan Pengadilan Agama*

Pengadilan Agama merupakan suatu badan peradilan yang turut melaksanakan kekuasaan hakim dan memegang peranan penting di dalam melaksanakan Undang-undang perkawinan. Keberadaan lembaga Pengadilan Agama di Indonesia merupakan wadah untuk menyelesaikan perkara umat Islam, dimana kewenangan dan ruang lingkup Pengadilan Agama mengalami pasang surut.

Setelah Indonesia merdeka, perkembangan tata hukum Pengadilan Agama sangat pesat. Hal ini ditandai dengan peraturan perundang-undangan semakin mempertegas ruang lingkup dan eksistensi kekuasaan wewenang Pengadilan Agama dalam menegakkan lembaga kehakiman.

Adapun peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Undang-undang Peradilan Agama.
4. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.¹

¹ Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Yogyakarta Pres, 1993), h. 50.

Dengan adanya perundang-undangan di atas maka nampak jelas kemajuan dan perkembangan Peradilan Agama. Dimana peraturan yang menjadi dasar hukum Pengadilan Agama merupakan wujud nyata bahwa kedudukan Pengadilan Agama sekarang telah dipertegas dengan perundang-undangan, seperti Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.²

Dalam pasal 18 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.³

Dari bunyi pasal tersebut, nampak jelas telah adanya klasifikasi lembaga peradilan dan ruang lingkup masing-masing yang berarti menunjukkan kemajuan dalam Tata Hukum Indonesia. Akan tetapi bila dilihat ruang lingkup kewenangan mengadili dalam lingkungan Pengadilan Agama maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa kewenangan Pengadilan Agama hanya meliputi perkara-perkara tertentu saja, ini berarti klasifikasi ruang lingkup Pengadilan Agama yang ada belumlah sempurna.

² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta; Ind. Hill Co, 1991), h. 99.

³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Dharma Bhakti, 2009), h. 8.

Berdasarkan penjelasan dalam pasal 18 Undang-undang No. 48 Tahun 2009, maka akan dapat berakibat kesalah pahaman dan kesimpang siuran dalam menentukan batasan-batasan kompetensi absolut dari pada lembaga pengadilan.⁴

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama dan ruang lingkup dalam hubungan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a). Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristeri lebih dari seorang.
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum 21 tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.
8. Perceraian karena talak.
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Mengenai penguasaan anak-anak.

⁴ *Ibid.*,

12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang sebagai wali dicabut.
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal usul seorang anak.
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁵

⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama UU RI No. 3 Th. 2006* (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 29-30.

B. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Iddah

Kewenangan Pengadilan Agama merupakan sistem yang dimiliki oleh badan peradilan untuk menerima, menyelesaikan dan memutuskan atas perkara tertentu. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan dan memutuskan suatu perkara tertentu itu merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Masa iddah itu sendiri merupakan akibat dari suatu perceraian dimana permasalahan dari perkara ini termasuk pada kewenangan absolut Pengadilan Agama.⁶

Ini menunjukkan bahwa penetapan masa iddah itu sendiri merupakan dampak dari suatu perkara perceraian yang dituntutkan, berarti merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memutuskan serta menetapkannya. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, dimana semua perkara perdata yang masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Agama menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama.⁷

Bunyi Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yaitu antara lain:

“Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.⁸

Berdasarkan bunyi pasal di atas bahwa setiap warga Negara yang beragama Islam dapat mencari keadilan di Pengadilan Agama dan perangkat Pengadilan Agama

⁶ Moh. Mahfud, *op. cit.*, h. 60.

⁷ Republik Indonesia, “Undang-undang R.I Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama” (Jakarta: Dharma Bakti, 1989), h. 3.

⁸ *Ibid.*,

harus menerima dan dapat menyelesaikan perkara yang diajukan terutama dalam masalah perceraian, yang berakibat pada penetapan iddah bagi isteri.

Setelah suatu perkara perceraian suami isteri telah diputuskan, maka dengan demikian Pengadilan Agama menetapkan pula masa iddah bagi isteri, akan tetapi setiap perceraian yang terjadi bagi setiap isteri akan mengalami masa iddah. Sehingga ini merupakan kewajiban dan wewenang Pengadilan Agama untuk menetapkan tenggang waktu masa iddah bagi si isteri.

Pihak istri harus mematuhi putusan tersebut dan menjalankan masa iddah yang telah diputuskan oleh pihak Pengadilan Agama karena itu untuk kepentingan suami isteri itu sendiri bila akan rujuk kembali. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Pasal 150 yang berbunyi:

“Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang masih dalam masa iddah”.⁹

Ini berjalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, karena penetapan masa iddah itu sendiri bagi hakim Pengadilan Agama merupakan suatu rangkaian perkara perdata yang diputuskan, sebagaimana pula dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIII pasal 163 yang berbunyi:

1. Seorang suami dapat merujuk isterinya yang masih dalam masa iddah.
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:

⁹Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I.(Jakarta: 1991), h. 70.

- a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qobla al-dukhul.
- b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.¹⁰

Akan tetapi jika seorang istri tidak mematuhi masa iddah yang telah diputuskan sebagaimana mestinya, hal ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan sanksi ataupun sejenisnya. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama benar-benar hanya menangani perkara-perkara khusus yang menjadi kewenangannya dan diajukan ke Pengadilan Agama. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang termasuk perkara bidang perdata.

Bunyi Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 antara lain:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:
 - a. Perkawinan.
 - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
 - c. Wakaf dan shadaqah.
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

¹⁰ *Ibid.*, h. 74-75.

3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.¹¹

Dari bunyi pasal di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan nafkah iddah itu merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam yuridisnya. Adapun dalam penetapan masa iddah itu sendiri walaupun itu merupakan suatu rangkaian dari penyelesaian perkara perceraian akan tetapi merupakan traktat atau kebiasaan hakim-hakim terdahulu dalam menetapkan suatu perkara.



¹¹ *Ibid.*, h. 14.

BAB IV

PROSES PENYELESAIAN NAFKAH IDDAH SUAMI KEPADA ISTERI YANG TELAH DICERAI

A. Proses Penyelesaian dan Sikap Pengadilan Agama Terhadap Bekas Suami yang Tidak Menjalankan Kewajiban

Pengadilan Agama merupakan lembaga kehakiman yang mempunyai hak dan kekuasaan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara perdata khusus. Sebenarnya sikap Pengadilan Agama terhadap bekas suami yang tidak menjalankan kewajibannya pada masa iddah isteri tergantung dari bekas istri itu sendiri apakah ia mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama atau tidak.

Sebagaimana bunyi Pasal 66 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 antara lain:

1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
3. Dalam hal termohon bertempat di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah kediaman pemohon.

4. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak.¹

Dari bunyi pasal tersebut di atas maka dapat ditarik pengertian bahwa perkara dapat diselesaikan dan menjadi hak milik Pengadilan Agama dengan catatan apakah perkara tersebut dituntutkan di Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan Pasal 77 ayat (5) Bab XII Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.²

Apabila suami tidak melaksanakan keputusan Pengadilan Agama tentang keharusan membayar nafkah iddah, tetapi isteri sudah merelakannya maka Pengadilan Agama tidak berhak menuntut kepada suami.³

¹ Republik Indonesia, “Undang-undang R.I Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama” (Jakarta: Dharma Bakti, 1989), h. 17-18.

² Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I.(Jakarta: 1991), h. 43.

³ *Ibid.*,

1. Pengadilan Agama Berusaha Untuk Mendamaikan

Tentang isteri yang memintakan atau menuntut kembali ke Pengadilan Agama tentang bekas suami yang tidak menjalankan kewajibannya dapat dilihat pada Pasal 55 Bab IV Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi antara lain:

“Tiap pemeriksaan di Pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperaka telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”.⁴

Bunyi pasal di atas memberikan pengertian bahwa setelah diajukan suatu permohonan atau gugatan perkara bekas suami melalaikan kewajibannya, maka Pengadilan Agama akan memanggil para pihak untuk diminta keterangannya yang berhubungan dengan pokok permasalahan perkara tersebut. Setelah pemanggilan para pihak, Pengadilan Agama berusaha meramalkan para pihak. Jadi permasalahan tentang suami yang tidak melakukan kewajiban tersebut Pengadilan Agama dapat menganjurkan kepada si suami untuk diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.

Mendamaikan kedua belah pihak di dalam suatu perkara oleh dewan hakim Pengadilan Agama itu merupakan salah satu asas Pengadilan Agama, dan bila dalam perdamaian tersebut ada kata kesepakatan dari kedua belah pihak maka Pengadilan Agama dalam ruang lingkupnya hanya mencukupkan perkara tersebut samapai tercapai perdamaian saja, dan itu menunjukan salah satu dari asas Pengadilan Agama

⁴ *Ibid.*, h. 15.

telah tercapai sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 56 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi antara lain:

1. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya.
2. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian secara damai.⁵

Lebih lanjut mengenai permasalahan perdamaian di dalam proses penyelesaian suatu perkara diatur dalam Pasal 82 Undang-undang No. 1 Tahun 1989 yang berbunyi:

1. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
2. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
3. Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.

⁵ *Ibid.*, h. 16.

4. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.⁶

Dari bunyi kedua pasal di atas memberikan suatu pengertian dan batasan tentang ketentuan perdamaian bagi pihak-pihak yang berperkara, sebab perdamaian itu sendiri memang sangat layak dan sangat penting dimuat dalam menyelesaikan perkara tersebut. Kalau upaya perdamaian dapat tercapai di dalam suatu perkara, maka hal tersebut telah menunjukkan bahwa perkara tersebut dianggap selesai pada tahap perdamaian oleh pihak dewan majlis hakim Pengadilan Agama.

Disamping itu memang di dalam acara perdata usaha untuk mendamaikan oleh dewan majlis hakim Pengadilan Agama terhadap yang berperkara juga diatur dan merupakan hal yang sangat penting.⁷

Apabila benar-benar telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak dalam suatu perkara, maka dewan majlis hakim Pengadilan Agama di dalam menunaikan kewajibannya dan intervensi terhadap perkara tersebut sudah dianggap selesai, karena ini sangat sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada tentang perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara. Sebagaimana yang telah diatur pula pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

⁶ *Ibid.*, h. 21.

⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h. 42.

1. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara.
2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan.⁸

Di dalam Peraturan Pelaksanaan Perundang-undangan tersebut di atas tidak adanya menunjukkan batasan-batasan ketentuan yang menyatakan bahwa apabila telah tercapainya suatu perdamaian maka dari perdamaian tersebut dapat dibuatkan suatu akta perdamaian yang mana akta tersebut dapat memberikan kekuatan yang sama dengan suatu putusan atau penetapan dimana dapat dijalankan seperti halnya suatu putusan atau penetapan itu sendiri mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹

2. Pengadilan Agama dalam Menjatuhkan Putusan

Pengadilan Agama di dalam operasionalnya bersikap aktif terhadap para pihak terutama kepada para pihak mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya atau dimintakan di Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berperan aktif di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pengadilan Agama berdasarkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 ayat (3) yang berbunyi:

“Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”.¹⁰

⁸ Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan* (Cet. I; Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 37.

⁹ *Ibid.*, h. 80.

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 124.

Apabila terjadi perselisihan pendapat antara suami dan isteri mengenai besar kecilnya jumlah nafkah tersebut maka Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah dan wujud nafkah iddah kepada isteri, dimana jumlah dan wujud nafkah tersebut disesuaikan dengan kemampuan si suami dengan tanpa memberatkan si suami. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
2. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹¹

Bunyi pasal tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama sesungguhnya bersifat membantu menyikapi terhadap perkara suami yang diajukan isteri ke Pengadilan Agama dikarenakan tidak menunaikan kewajibannya.

Sikap Pengadilan Agama terhadap perkara tersebut adalah memberikan putusan atau penetapan perkara tersebut. Dimana dengan sendirinya putusan telah memerintah kepada mantan suami untuk menjalankan kewajibannya terhadap bekas isteri.

Untuk mengetahui bentuk putusan atau penetapan Pengadilan Agama secara spesifik dapat dirujuk dari ketentuan Perundang-undangan Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 sampai Pasal 64 Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

¹¹ *Ibid.*, h. 16.

Kemudian selain ketentuan Perundang-undangan pasal tersebut di atas maka bentuk keputusan atau penetapan Pengadilan Agama ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 60 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

“Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.¹²

Suatu putusan atau penetapan Pengadilan Agama dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dan apabila setelah putusan perkara tersebut tidak adanya catatan hukum atau pihak lain mengajukan banding, dengan sendirinya kedua belah pihak harus mematuhi dan menjalankan dari pada isi pokok materi keputusan tersebut.

Jumlah nafkah itu sendiri dapat dimusyawarahkan antara kedua belah pihak yang berkepentingan yaitu antara suami dan isteri secara langsung. Bila tidak tercapai suatu kesepakatan di dalam musyawarah maka Pengadilan Agama dapat pula dengan wewenangnya menentukan besar kecilnya jumlah nafkah tersebut berdasarkan kemampuan suami dan tidak memberatkan kepada pihak mantan suami.¹³

Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata khusus pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam. Implikasinya setiap orang yang beragama Islam dapat mengajukan atau menuntut semua perkara perdata khusus ke Pengadilan Agama sesuai dengan daerah yuridis dan kompetensi absolut.

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

Salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah menetapkan nafkah iddah bagi si isteri yang dicerai oleh suaminya dimana perkara tersebut merupakan suatu rangkaian perkara perdata dari akibat terjadinya suatu perceraian. Masalah ini telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-undang No. 14 Tahun 1985, Undang-undang No. 7 Tahun 1989, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.

Dari peraturan perundang-undangan yang ada tersebut telah menunjukkan dan merupakan suatu keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia itu telah sejajar dengan lembaga Pengadilan lainnya.

Berdasarkan data-data penelitian penulis yang diperoleh di Pengadilan Agama Kota Kupang pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 mengenai perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Kupang antara lain:

Tabel I

No.	Bulan	Tahun 2010		
		Cerai Talak	Cerai Talak yang Diputus	Cerai Talak yang Tidak Diputus
1.	Januari	35	20	15
2.	Februari	28	18	15
3.	Maret	34	20	14
4.	April	26	10	16
5.	Mei	24	19	5
6.	Juni	24	16	8

7.	Juli	30	15	15
8.	Agustus	25	10	15
9.	September	28	18	10
10.	Oktober	23	10	13
11.	Nopember	38	20	18
12.	Desember	28	16	8
Jumlah		343	192	152

Sumber Data : Dokumentasi Pengadilan Agama Kupang

TABEL II

No.	Bulan	Tahun 2011		
		Cerai Talak	Cerai Talak yang Diputus	Cerai Talak yang Tidak Diputus
1.	Januari	28	18	10
2.	Februari	27	17	10
3.	Maret	51	30	21
4.	April	24	10	14
5.	Mei	24	14	10
6.	Juni	24	12	12
7.	Juli	33	21	12
8.	Agustus	17	10	7
9.	September	42	30	12
10.	Oktober	36	16	20
11.	Nopember	41	30	11
12.	Desember	30	21	9
Jumlah		377	229	148

Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Kupang

Dari data di atas dapat digambarkan bahwa pada tahun 2010 untuk perkara cerai talak yang diterima oleh Pengadilan Agama Kupang sebanyak 343 perkara, sedangkan pada tahun 2011 untuk perkara cerai talak yang diterima sebanyak 377 perkara. Dari data tersebut perkara cerai talak yang ada di Pengadilan Agama Kupang adalah sebanyak 20% perkara dan yang diputuskan hanya 18% dari perkara tersebut. Dari data di atas, perkara cerai talak yang berhasil diputus oleh Pengadilan Agama Kupang sebanyak 192 perkara pada tahun 2010 dan 229 perkara pada tahun 2011. Sedangkan perkara cerai talak yang tidak diputus oleh Pengadilan Agama Kupang sebanyak 152 perkara pada tahun 2010 dan 148 perkara pada tahun 2011.

B. Putusan Pengadilan Agama Kupang

P U T U S A N

Nomor : 0082/Pdt.G/2011/PA.Kp

Bismillahirrahmnirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama pada sidang majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

MUHAMMAD AMIN Bin LAODE SEDO, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Nelayan (nakhoda kapal cakalang), tempat tinggal di R.T 02 R.W 01

Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L A W A N

HADISAH Binti YOHANIS MANGGE, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di R.T 008 R.W 006, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2011 yang telah terdaftar pada register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor: 0082/Pdt.G/2011/PA.Kp, yang telah diperbaiki dan dilengkapi secara lisan di persidangan, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari 1983, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA), sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/5/1983 tanggal 23 Juli 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia Kota Madya Kendari;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Termohon di Kendari selama 9 tahun, dan selanjutnya pada

tahun 1995 Pemohon dan Termohon pindah ke Kupang dan tinggal di rumah mama Taru Ali di Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang, setelah itu pada tahun 2004, pindah dan tinggal di rumah bapak H. Arsyad di Tenau dan pada tahun 2011 pindah ke rumah kontrakan di Nunbaun Sabu sebagai tempat kediaman bersama sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan Oktober 2011;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

1. MISNAWATI AMIN, Perempuan (sudah menikah);
2. FATMAWATI AMIN, Perempuan (belum menikah);
3. HARDIANTI AMIN, Perempuan Umur 17 tahun;
4. HAIRUDIN AMIN, Laki-Laki Umur 16 Tahun;

Anak kedua dan ketiga tinggal bersama kakaknya MISNAWATI AMIN di Kendari, sedangkan HAIRUDIN AMIN tinggal bersama Termohon di Kupang;

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 1985 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa pada saat Pemohon bekerja sebagai motoris (antar jemput barang perusahaan) di U.D. SETIA BUDI, Termohon selalu marah - marah karena Pemohon jarang di rumah, Pemohon telah berusaha menjelaskan bahwa kerja

Pemohon sebagai motoris tidak ada ketetapan hari untuk istirahat karena harus mengambil barang perusahaan sesuai dengan perintah pimpinan perusahaan, namun Termohon tetap tidak mengerti;

- b. Bahwa setiap kali Termohon marah, Termohon selalu mendoakan Pemohon agar hanyut di laut saat mengantar barang atau menjemput barang perusahaan tersebut;
- c. Bahwa pada tahun 2004 pemohon keluar dari perusahaan UD.SETIA BUDI dan bekerja dikapal cakalang untuk mencari ikan, namun setiap kali pulang dari mencari ikan, Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, hal itu membuat Pemohon merasa tertekan dan tidak nyaman berada di rumah sehingga Pemohon memilih tidur di atas kapal cakalang;
- d. Bahwa pada tanggal 31 oktober 2011, Termohon melaporkan Pemohon kepolisi dengan dalil Pemohon tidak pernah memberikan nafkah, padahal Pemohon selama ini tidak melalaikan kewajiban dan selalu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon dan anak-anak;
- e. Bahwa pada bulan November 2011, Pemohon kembali dari laut dan ketika Pemohon tiba di rumah dan belum sempat istirahat, Termohon langsung marah-marah dan menanyakan kepada Pemohon "kenapa baru pulang" dan Pemohon berusaha tenang dan menjelaskan bahwa kapal cakalang itu cari ikannya di laut lepas sehingga baru bisa pulang, namun tetap saja Termohon

tidak mengerti dan terus marah-marah dan bahkan menuntut Pemohon untuk menceraikannya dengan segera;

- f. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon akhirnya tinggal di atas kapal selama 1 bulan lebih untuk menenangkan pikiran, tetapi Termohon menyusul Pemohon dan memukul Pemohon di kepala bagian belakang sampai Pemohon merasa pusing dan sempoyongan;
 - g. Bahwa pada tanggal 6 desember 2011, Termohon melaporkan Pemohon kepolisi dengan dalil Pemohon tidak pernah memberikan nafkah dan menuntut Pemohon untuk membayar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), dan tuntutan itu Pemohon telah memenuhinya, hal itu bukan berarti Pemohon selama ini tidak memberikan nafkah, tetapi Pemohon lakukan untuk menghindari terjadi kekerasan terhadap Pemohon, dan pada saat itu juga Termohon menuntut Pemohon agar cepat menceraikan Termohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Oktober 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/ pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon tinggal di Kelapa Lima sedangkan Termohon tetap ditempat kediaman bersama;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit

dipertahankan lagi ; maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (MUHAMMAD AMIN Bin LAODE SEDO) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (HADISAH Binti YOHANIS MANGGE) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediasi dengan mediator Dra. RISANA YULINDA,S.H, M.H, hakim Pengadilan Agama Kupang, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 18 Januari 2012 sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 4 huruf (b) tidak benar Termohon mendoakan Pemohon hanyut di laut;
Huruf (c) tidak benar Pemohon tidur di kapal cakalang, yang benar Pemohon tidur di rumah selingkuhannya;
Huruf (e) tidak benar Termohon marah-marah ketika Pemohon pulang dari laut untuk mencari ikan, yang benar adalah Termohon marah - marah karena Pemohon tidak pulang ke rumah melainkan tidur di rumah selingkuhannya;
2. Bahwa selain sanggahan tersebut di atas Termohon mengakui kebenaran isi surat Permohonan Pemohon;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui semua jawaban lisan

Termohon dengan tambahan keterangan, bahwa perempuan selingkuhannya itu bernama LILIS SURYANI dan sudah nikahi Pemohon secara sirri;

Bahwa karena Pemohon sudah mengakui jawaban Termohon, maka Termohon selanjutnya tidak menyampaikan duplik;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tulis/ surat

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon di persidangan berupa:

1. Foto copy kutipan Akta Nikah nomor : 69/5/1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Madya Kendari, tanggal 23 Juli 1983, telah dilegesir dan telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotocopy kartu Tanda Penduduk NIK: 5371010210020003, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tanggal 09 Maret 2011, telah dilegesir dan telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping kedua alat bukti tulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. YOHANIS TUFAN Bin SANGULEA TUFAN, Umur 50 tahun, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di R.T. 12, R.W. 05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang:

- Bahwa saksi mengaku tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun pekerjaan dengan pihak berperkara;
- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon biasa dipanggil dengan sebutan pak Amin sedangkan Termohon biasa dipanggil dengan sebutan mama Yuli;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon datang pertama kali merantau ke Kupang pada tahun 1983 dan tinggal di Tenau di rumah mertua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon seorang nelayan dan sebagai juragan kapal Cakalang, sedangkan Termohon adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tiga orang anak Pemohon dan Termohon tinggal di Kendari, sedangkan yang satu orang anak yang terakhir ikut bersama dengan Termohon di Kupang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menuduh Pemohon telah mempunyai perempuan simpanan;
 - Baik oleh saksi, Pemohon dan Termohon berdamai Bahwa pada Agustus 2011, Pemohon dan Termohon secara bersama-sama datang ke rumah saksi dengan membawa persoalan, Termohon ingin bercerai dengan Pemohon, karena Pemohon telah mempunyai isteri simpanan tersebut di atas. Ketika itu persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah pergi ke bar dan mabuk-mabukan, karena Pemohon selalu bersama saksi, pergi melaut bersama-sama karena satu perahu dan pulang-pulangnya pun bersama-sama;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan terakhir ini, Pemohon tinggal di Kelapa Lima, sedangkan Termohon tinggal di Nunbaun sabu;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon menghendaki bercerai dengan Pemohon;
2. SACE BAWA LOMI BINTI NARA ROHI, Umur 49 tahun, Agama Kristen Portestan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di R.T. 17, R.W. 04, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

- Bahwa saksi mengaku tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun pekerjaan dengan pihak berperkara;
- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga, Pemohon biasa dipanggil dengan sebutan pak Amin sedangkan Termohon biasa dipanggil dengan sebutan mama Yuli;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon datang pertama kali merantau ke Kupang pada tahun 1983 dan tinggal di Tenau di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon seorang nelayan dan sebagai juragan kapal Cakalang, sedangkan Termohon adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tiga orang anak Pemohon dan Termohon tinggal di Kendari, sedangkan yang satu orang anak yang terakhir ikut bersama dengan Termohon di Kupang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengaku, bahwa Termohon sering curhat dan menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi, sehingga saksi mengetahui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sebab Pemohon jarang pulang karena mempunyai perempuan simpanan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan terakhir ini, Pemohon tinggal di Kelapa Lima, sedangkan Termohon tinggal di Nunbaun Sabu;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon menghendaki bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, sebelum Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir, Pemohon meyatakan secara lisan di persidangan, bahwa apabila permohonannya ini dikabulkan, maka Pemohon berjanji akan memberikan kepada Termohon:

1. Mut'ah berupa satu unit rumah permanen beserta pekarangannya dengan ukuran rumah: 7 X 9 meter, yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas: 9 X 30 meter, terletak di Desa Torombulu, Kecamatan La'ea Kabupaten Onawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: rumah Albert;
 - Sebelah Selatan: rumah Haji Ruba';
 - Sebelah Barat: jalan raya;
 - Sebelah Timur: kali;
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut di atas, Termohon menyatakan secara lisan di persidangan, bahwa Termohon menerimanya;

Bahwa pada kesimpulan akhir, Pemohon menyatakan pada intinya tetap pada permohonannya semula, yakni ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon pada kesimpulan akhirnya menyatakan, pada prinsipnya tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dirujuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediasi sebagaimana ketentuan pasal 7 PERMA No: 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti: a. tertulis/ surat berupa: 1. foto kopy Kutipan Akta Nikah (P.1) dan 2. foto kopy kartu tanda penduduk (P.2) dan b. 2

(dua) orang saksi. Kedua jenis bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti(P.1) berupa foto kopy Kutipan akta nikah yang merupakan bukti autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, oleh karenanya mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti(P.2) berupa foto kopy Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan kompetensi relative, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon, karena Pemohon mendalilkan rumah tangga dan/ atau perkawinannya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah retak sejak tahun 1985, yang disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011, sehingga tidak ada harapan akan bisa hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan meluruskan sebagian lainnya,serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi permohonan dan replik Pemohon, maka Majelis Hakim dapat mengkonstatir peristiwanya, bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 27 tahun, atau setidaknya-tidaknya 4 bulan terakhir ini selalu tidak harmonis, yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh jarangnyanya Pemohon pulang setelah melaut dan didoakan celaka ketika melaut oleh Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dan tertekan, serta hadirnya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon telah menikah lagi secara sirri dengan seorang perempuan bernama LILIS SURYANI, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Termohon. Di lain pihak Termohon menyatakan, bahwa Termohon memarahi Pemohon, sebab Pemohon jarang pulang setelah bekerja karena tinggal di tempat istri simpanannya, serta Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, akibatnya Termohon menganiaya Pemohon dan melaporkannya kepada pihak keamanan;

Menimbang, bahwa kumulasi dari kejadian-kejadian tersebut menyebabkan memuncaknya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal, Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kost bersama istri sirrinya, sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Nunbaun Sabu sampai dengan sekarang dan akhirnya Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i, karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon;

Menimbang, bahwa konstruksi peristiwa tersebut dikuatkan oleh pengakuan para pihak dan keterangan para saksi yang bertetangga dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil Pemohon yang diakui Termohon dan dalil Termohon yang diakui Pemohon, serta keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama kurang lebih 29 tahun. Hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yaitu sejak menikah tahu 1983 sampai dengan tahun 1985;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami keretakan dan ketidakharmonisan dalam waktu yang cukup lama, kurang lebih 27 tahun, yaitu sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon jarang pulang setelah bekerja atau melaut, juga disebabkan karena terbaginya cinta Pemohon dengan kehadiran pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan bernama LILIS SURYANI;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan fisik oleh Termohon terhadap Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan terakhir, yaitu sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan sekarang dan selama itu tidak saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa rumah tangga/ perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah mengalami keretakan yang sangat parah (broken home and broken marriage), yang mengindikasikan bahwa hati keduanya juga telah pecah (broken heart);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama (selama 4 bulan terakhir) dan keduanya tidak berupaya untuk kembali hidup bersama, maka hal tersebut mengindikasikan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa diperbaiki dan tidak bisa kembali bersatu;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya

seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menurut kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), bahwa *“mencegah timbulnya kerusakan /madllarat itu harus diutamakan daripada mengambil manfaat”*. Oleh karena itu *“bahaya/madharaat itu harus dihilangkan”*. Sehingga Majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun ternyata tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras mau bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan yang mulia itu dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan telah terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah karena kehendak suami, dalam hal ini Pemohon, sedangkan istri, dalam hal ini Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kemampuannya kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama tiga bulan seluruhnya berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah);

2. Mut'ah berupa satu unit rumah permanen beserta pekarangannya dengan ukuran rumah: 7 X 9 meter, yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas: 9 X 30 meter, terletak di Desa Torombulu, Kecamatan La'ea Kabupaten Onawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: rumah Albert;
- Sebelah Selatan: rumah Haji Ruba';
- Sebelah Barat: jalan raya;
- Sebelah Timur: kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dua kali diamandemen, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (MUHAMMAD AMIN Bin LAODE SEDO) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HADISAH Binti YOHANIS MANGGE) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

- a. Nafkah iddah selama tiga bulan seluruhnya berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa satu unit rumah permanen beserta pekarangannya dengan ukuran rumah: 7 X 9 meter, yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas: 9 X 30 meter, terletak di Desa Torombulu, Kecamatan La'ea Kabupaten Onawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: rumah Albert;
 - Sebelah Selatan: rumah Haji Ruba';
 - Sebelah Barat: jalan raya;
 - Sebelah Timur: kali
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1433 H, oleh kami Drs. MUH. MUKRIM., sebagai Ketua Majelis, Drs. HASAN BASRI dan Drs. TAUFIK, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu SAFIIN MADAR, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*,

Dari data perkara di atas seorang suami wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan isterinya berupa uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sebuah rumah untuk ditinggali oleh anak-anak dan mantan isterinya.

Dari hasil penelitian di atas penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Kupang telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan-pembahasan tersebut di atas mengenai kewajiban nafkah iddah suami terhadap isteri yang telah diceraikan, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Konsep iddah menurut hukum Islam dan hukum Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. Menurut hukum Islam

Al-Qur'an surat At-Thalak ayat 7, konsep nafkah iddah dijelaskan yang artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

b. Menurut Perundang-undangan

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam pasal 34 yaitu:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

- 3) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
2. Seorang hakim Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan-keputusan atau penetapan nafkah iddah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Akan tetapi dalam pengambilan putusan atau ketetapan Pengadilan Agama dalam penyelesaian nafkah iddah melalui sebuah proses pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut kesepakatan antara suami isteri yang mengajukan gugatan perceraian.
3. Dalam pengambilan putusan, seorang hakim Pengadilan Agama Kota Kupang dalam menyelesaikan nafkah iddah sudah ada kesesuaian dengan hukum Islam. Akan tetapi ada beberapa kasus yang diputuskan tidak sesuai dengan hukum Islam, hal ini dikarenakan berbagai pertimbangan-pertimbangan sehingga tidak merujuk kembali dengan hukum Islam bahwa nafkah iddah dalam Islam itu wajib dilaksanakan bagi suami yang bercerai dengan isterinya.

B. Saran-saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis mengajukan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya masalah hak dan kewajiban suami isteri pada masa iddah mendapat perhatian dari instansi terkait terutama lembaga Pengadilan Agama, karena banyak suami isteri yang mengajukan gugatan perceraian tidak mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, maka harus diadakannya penyuluhan-

penyuluhan terkait tentang Undang-undang perkawinan dan aturan-aturan lainnya.

2. Agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat suatu Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan kepada setiap perceraian suami isteri untuk menjalankan kewajiban-kewajiban suami isteri pada masa iddah.
3. Dasar hukum putusan harus lebih dilengkapi. Hal ini untuk menghindari adanya rasa ketidak puasan dari kedua belah pihak yang berperkara, serta haik jangan sampai dipengaruhi oleh keadaan psikologinya dan senantiasa memperhatikan manfaat serta mudhorot dari pada suatu putusan atau penetapan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. VI; Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunnah ibn Majjah*, juz. 1. Beirut: Dar Al-Fikr, 1990.
- Basyir, Azhari. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 2002.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan DEPAG, *Ilmu Fiqih*. vol. 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Ghazaly, H. Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamdani, Said bin Abdullah bin Thalib bin. *Risalah Nikah*. Terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Jawad, Muhammad Mughriyah. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Jurjawi, Syekh Ali Ahmad. *Hikmatuh al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Terj. Hadi Mulyo, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: Adhi Grafika, 1992.
- Latief, H. M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: 1982.
- Mahfud, Moh. *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Yogyakarta Pres, 1993.
- Meliala, Djaja S. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Cet. I; Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Muktar, Kamal. *Asas-asas Hukum Perkawinan*. Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Nawawi, Imam. *Riyadhus Sholihin*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 1992.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ind. Hill. Co, 1991.
- Republik Indonesia. "Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" dalam *Direktorat Pembinaan*

Peradilan Agama, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. Jakarta: Liberty, 1991.

Republik Indonesia. “Undang-undang R.I. Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”. Jakarta: Dharma Bhakti, 1971.

Republik Indonesia. “Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”. Jakarta: Dharma Bhakti, 1989.

Rusd, Ibnu dan Imam Ghozali Said. *Bidayatul Mujtahid*. vol. 3. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* 8. Terj. Muh. Tholib. Cet. II; Bandung: Al-Ma’arif, 1983.

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Sastroadmojo, H. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Soemiyati. *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1982.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Jakarta Kencana, 2007.

Thalib, M. *Liku-liku Perkawinan*. Cet. I; Yogyakarta: PD. Hidayat, 1986.

Umar, Anshori. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV. Asy Syifa’, 1986.

Wawancara dengan Bapak H. Saiful Heja. Ketua Pengadilan Agama Klas I B Kupang, tanggal 17-30 April 2012.

Wawancara dengan Bapak M. Sidiq. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Klas I B Kupang, Tanggal 20 April 2012.

Yanggo, Chuzaimah T, *et al.*, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

INTERNET

<http://satriabajahikam.blogspot.com/2012/04/pengertian-dan-dasar-hukum-iddah.html> diakses tanggal 29 April 2012.